

## ABSTRAK

Penyitaan merupakan tindakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan yang diatur oleh Hukum acara sebagai kelengkapan proses pemeriksaan perkara. Dengan kata lain penyitaan merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan tata tertib beracara dalam beracara dimuka Pengadilan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat Hukum terhadap kreditor dalam sita persamaan, bagaimana Pertimbangan hakim dalam Putusan nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Bdw. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat Hukum dan analisis Pertimbangan hakim dalam Putusan nomor: 14/Pdt.G/2018/PN Bdw. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan penulis yaitu sita jaminan atas objek yang dibebani hak tanggungan berkedudukan sebagai sita persamaan, sita persamaan kedudukannya dibawah hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan diberikan kedudukan yang diutamakan daripada kreditor-kreditor lain. Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari penggugat yang berisi tentang permintaan untuk melakukan Sita jaminan. Namun karena barang yang dimintakan Sita telah diagunkan kepada pihak Bank, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan Sita jaminan namun dalam bentuk sita persamaan. Hal ini diputuskan oleh hakim berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan Hakim memutuskan Sita Persamaan adalah agar ada kepastian dan upaya paksa bagi debitor agar harta benda yang disengketakan itu dapat memenuhi hutangnya atau jaminan bagi sengketa perkaranya.

**Kata Kunci:** Sita Jaminan, Sita Persamaan, wanprestasi

## **ABSTRACT**

*Confiscation is a legal action carried out by the Court which is regulated by the procedural law as a completeness of the case examination process. In other words, confiscation is a means to support the implementation of procedural procedures in proceedings before the Court. The issues raised in this research are how the legal consequences for creditors in confiscation of equality, how the judge's consideration in Decision number: 14/Pdt.G/2018/PN Bdw. The purpose of this study is to determine the legal consequences and analysis of judges' considerations in Decision number: 14/Pdt.G/2018/PN Bdw. In this study the author uses a normative juridical approach. The author's conclusion is that the confiscation of collateral on the object that is burdened with Mortgage is located as an equal confiscation, confiscates the equality of its position under the Mortgage Right. The holder of the mortgage is given a priority position over other creditors, In Decision Number 14/Pdt.G/2018/PN Bdw , the judge decided to grant the claim from the plaintiff which contained a request to confiscate bail. However, because the goods requested by Sita have been pledged as collateral to the Bank, the Judge decided to grant the confiscation of collateral but in the form of confiscation of equality. This was decided by the judge based on several considerations. One of the reasons the judge decided on confiscation of equality was so that there was certainty and coercive measures for the debtor so that the disputed property could fulfill its debt or guarantee for the disputed case.*

**Keywords:** *confiscation of collateral, confiscation of equality, default*

**KARAWANG**